

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan dan struktur penulisan penelitian.

### **1.1. Latar Belakang**

Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang memiliki potensi yang tinggi dalam terkena bencana. Hal ini dikarenakan fisiografi utama wilayahnya terdiri dari perbukitan tersier, daratan rendah, dan terhubung langsung ke pantai yang mana laut di Kota Padang terbentuk dari pertemuan dua lempeng dunia. Lempeng tersebut adalah Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia (Zein et al, 2014).

Kota Padang memiliki jumlah korban meninggal terbanyak pada saat terjadi bencana gempa bumi pada tahun 2009 dibandingkan dengan kota maupun kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Tercatat pada saat gempa bumi tahun 2009 silam terdapat 327 korban jiwa di Kota Padang, sedangkan pada daerah lainnya hanya berkisar puluhan korban jiwa kecuali pada Kabupaten Padang Pariaman yaitu terdapat sebanyak 292 korban jiwa (Zein et al, 2014). Data ini dapat dilihat pada **Gambar 1.1**

Tidak hanya gempa bumi, banjir juga menjadi bencana yang paling sering melanda Padang. Dalam Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Povinsi Sumatera Barat (2016) disebutkan bahwa banjir merupakan bencana yang penanggulangannya menjadi prioritas di Kota Padang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kota Padang memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana. Apabila risiko terjadinya bencana terbilang tinggi di suatu daerah maka hal ini harus menjadi perhatian bagi masing-masing



**Gambar 1.1** Jumlah Korban Saat Gempa Bumi 2009 di Sumatera Barat  
(Zein et al, 2014)

pemerintah daerah. Maksudnya adalah penanggulangan bencana di suatu daerah memiliki karakteristik yang khas dan belum tentu dapat diterapkan di daerah lain sehingga setiap daerah harus mempersiapkan perencanaan tersendiri dalam menanggulangi bencana (Maarif, 2012). Berdasarkan hal tersebut maka untuk menangani bencana di masing-masing daerah yang ada di Indonesia diberikan tanggung jawab kepada bidang-bidang yang bewenang dalam bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (BNPB, 2010).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Terdapat beberapa *stakeholder* terkait yang saling berperan dan berkoordinasi dalam penanganan bencana disamping lembaga pemerintahan. *Stakeholder* tersebut adalah masyarakat serta lembaga usaha masyarakat. Demikian pula menurut Putra (2015), beberapa kegiatan pengurangan risiko

bencana tertentu akan memerlukan koordinasi antara berbagai instansi seperti perguruan tinggi dan LSM, sedangkan peran BPBD adalah sebagai koordinator pelaksanaannya.

Menurut Limantoro (2015), masalah koordinasi yang terjadi saat ini diantaranya adalah model koordinasi antar lembaga kemanusiaan yang hanya melibatkan sedikit pihak yaitu dari badan pemerintahan seperti BPBD dan Dinas Kesehatan saja serta beberapa pihak lain seperti PMI. Koordinasi yang terbentuk masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut seperti tidak adanya pihak-pihak yang kompeten dalam bidang logistik karena tidak melibatkan pihak yang kompeten dibidang tersebut. Pihak-pihak yang dilibatkan seharusnya dapat lebih banyak seperti perusahaan, ritel dan lembaga pendidikan. Kemudian peranan dari setiap pihak yang terlibat dalam penanganan bencana tergolong masih belum jelas yang dapat dilihat dari beberapa aktivitas yang seharusnya cukup dikerjakan oleh satu lembaga saja akan tetapi dikerjakan oleh lembaga lain juga.

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa masih terdapat tumpang tindih peran antara instansi pemerintah yang terlibat seperti BPBD, dinas kesehatan dan lainnya. Hal ini berkaitan dengan masalah koordinasi (Putra, 2015). Permasalahan dalam koordinasi adalah seperti rancu dalam pemberian komando maupun arahan saat melakukan kegiatan penanggulangan bencana kepada pihak yang terlibat. Meskipun BPBD telah difungsikan sejak tahun 2008 sebagai pembuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, pemerintah masih kesulitan untuk mengkoordinasikan semua organisasi yang terlibat. Setiap organisasi cenderung bekerja sendiri dengan menggunakan fasilitas bantuan mereka tanpa/dengan adanya koordinasi dengan organisasi lain (Limantoro, 2015).

Berdasarkan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (2016), diketahui bahwa koordinasi antara instansi pemerintah terkait dalam penanggulangan bencana di Sumatera Barat pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan tahap pasca bencana masih memiliki kendala. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan

BPBD Kota Padang, hal ini dapat dilihat melalui partisipasi instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang masih kurang maksimal. Selain itu juga belum terdapat pihak swasta yang terikat dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kota Padang. Menurut Kepala Seksi Logistik, koordinasi antar instansi terkait telah terjalin akan tetapi masih dibutuhkan perbaikan. Koordinasi yang kurang baik ini terkadang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakmerataan pembagian logistik pada lokasi bencana karena terjadi penumpukkan logistik pada lokasi tertentu. Lamanya proses peminjaman peralatan yang tidak dimiliki BPBD Kota Padang seperti alat peledak untuk memecahkan batu besar yang jatuh ke jalan akibat longsor sehingga mengganggu aktivitas jalan raya yang lebih lama. Hal tersebut tentu harus dihindari.

Berdasarkan uraian permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut maka diperlukan perbaikan pada koordinasi dalam penanggulangan bencana di Kota Padang. Salah satu caranya adalah dengan menjalin hubungan antar *stakeholder* yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Menurut Fontainha *et al*, (2017), *stakeholder* dalam penanggulangan bencana digolongkan menjadi 3 bagian yaitu *public*, *private* dan *people* atau yang disebut dengan model *stakeholder* 3PR (*public*, *private*, *people relationship*). Ketiga golongan ini memiliki beberapa pembagian. Bagian *public* terdiri dari militer, pemerintah dan legislatif. Bagian *private* terdiri dari pihak swasta, pemasok langsung dan media. Sedangkan bagian *people* terdiri dari jaringan bantuan lokal, jaringan bantuan internasional dan donatur. Dengan mengacu pada model *stakeholder* 3PR tersebut di atas maka penelitian ini akan merumuskan bentuk peranan *stakeholder* dan hubungan antar *stakeholder* dalam koordinasi penanggulangan bencana di Kota Padang.



## 1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merumuskan peranan dan hubungan antar *stakeholder* dalam koordinasi penanggulangan bencana di Kota Padang berdasarkan model *stakeholder* 3PR.

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah merumuskan peranan dan hubungan *stakeholder* dalam koordinasi penanggulangan bencana di Kota Padang berdasarkan model *satkeholder* 3PR.

## 1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. *Stakeholder* yang diteliti berdasarkan pada model *stakeholder* 3PR yang diajukan oleh Fontainha *et al*, (2017).
2. Indikator dalam penanggulangan bencana yang digunakan adalah Indikator Keberhasian Penanggulangan Bencana (IKPB) hasil penelitian dari Abidi *et al*, (2013).

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 3 bab yaitu:

### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan .

### BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan metode yang digunakan. Teori-teori ini dapat bersumber dari buku, jurnal dan artikel ilmiah yang menjadi landasan dalam memecahkan masalah penelitian. Teori yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya mengenai bencana, model *stakeholder* 3PR, *Fuzzy Analytic Hierarchy Process* (FAHP), dan *Interpretive Structural Modeling* (ISM).

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian ini yaitu studi pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, tahapan penelitian, kebutuhan data penelitian, metode pengolahan data, analisis, dan penutup.

### BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisikan data yang dikumpulkan, pengolahan data berupa penentuan IKPB yang paling dibutuhkan di Kota Padang, penentuan peranandan hubungan antar stakeholder terhadap IKPB

### BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan analisa tentang IKPB yang paling dibutuhkan, analisa model hubungan antar stakeholder yang terbentuk serta analisa peranan stakeholder dalam penanggulangan bencana

### BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian serta saran untuk penelitian berikutnya